

Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar AS dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor dan Impor

Juli Panglima Saragih¹¹

Rupiah Depreciation Comparing to US Dollar Currency and Its Influence on Export and Import

Abstract

The depreciation of rupiah against US dollar will make positive and negative implications on the economy of Indonesia. This is a consequence of the open economy system and embraced free foreign exchange system. This paper aims to discuss and analyze some implications of the depreciation of Indonesian rupiah upon foreign trade, foreign loans, and government reserve money. This paper uses a qualitative approach with a descriptive-analysis method supported with relevant data and references to the above topic discussed. It was concluded that condition of high depreciation of the rupiah in-mid and long-term should have to encourage surplus of foreign trade balance and decreasing import. This is a constraint on condition of rupiah's depreciation. Moreover, depreciation of rupiah will be a benefit in competing similar products traded in international market. Depreciation of rupiah also can increase foreign direct investment to finance overall of businesses, as well as finance for development.

Keywords: Depreciation of Rupiah, Balance of Trade Surplus, Export-Import.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perekonomian terbuka yang diterapkan berbagai negara di dunia seperti Indonesia, membawa konsekuensi terjadinya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan orang atau negara lain. Peningkatan hubungan ekonomi luar negeri, juga disebabkan dan didorong oleh perkembangan ekonomi dalam negeri negara tersebut, khususnya perkembangan dan kemajuan sektor industri pengolahan baik migas maupun non-migas.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain, khususnya perdagangan luar negeri, investasi, pariwisata, dan lain-lain dilakukan melalui transaksi atau pertukaran mata uang seperti rupiah dengan dolar AS dan mata uang asing lainnya. Transaksi pertukaran mata uang rupiah terhadap dolar AS ini dilakukan di pasar uang melalui perkembangan nilai kurs (exchange rate) mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain, khususnya terhadap dolar AS.

¹¹Peneliti di Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270, saragihjulipanglima@yahoo.co.id atau julipsaragih@gmail.com

Besaran nilai kurs rupiah terhadap mata uang negara lain seperti dolar AS menentukan posisi tawar mata uang rupiah di pasar uang (money market) yang disebut dengan apresiasi dan depresiasi. Apabila selisih perbedaan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS sangat tipis/kecil, maka hal ini mengindikasikan rupiah cenderung mengalami apresiasi terhadap dolar AS, dan diprediksi nilainya akan dapat mendekati sama dengan nilai dolar AS dan dolar AS mengalami depresiasi terhadap rupiah Indonesia. Sebaliknya, apabila selisih perbedaan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS sangat besar/tinggi, maka hal ini menggambarkan rupiah cenderung semakin melemah atau mengalami depresiasi terhadap dolar AS dan dolar AS mengalami apresiasi (penguatan) terhadap rupiah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya apresiasi rupiah terhadap dolar AS, yakni jumlah peredaran dolar AS di pasar Indonesia cenderung semakin berkurang/sedikit. Artinya dolar AS semakin sulit diperoleh. Supply dolar AS yang semakin sulit dan sedikit di pasar valuta asing, maka mengakibatkan harga dolar AS (nilai kurs) cenderung naik terhadap rupiah. Kelangkaan dolar AS di Indonesia menyebabkan dolar AS mahal, sehingga nilai rupiah secara perlahan terdepresiasi atau melemah. Selain itu, kebijakan bank sentral AS (the US Federal Reserve) menaikkan suku bunganya, sehingga pemegang dolar AS cenderung akan menyimpan dolar di bank, baik di negara AS maupun di bank negara lain. Depresiasi rupiah juga disebabkan oleh depresiasi berantai terhadap mata uang negara Asia terhadap dolar AS.

Saat ini kurs rupiah terhadap dolar AS diperdagangkan Rp14.000-, dari sebelumnya Rp13.000. Artinya nilai dolar AS tetap, sedangkan nilai rupiah turun dan pembeli harus menambah nominal Rp1.000 untuk mendapatkan 1 dolar AS. Perekonomian Indonesia yang semakin terbuka dan bergantung kepada luar negeri khususnya impor barang dan jasa, menyebabkan kebutuhan dolar AS meningkat tajam. Tanpa diimbangi dengan ekspor yang meningkat juga maka dolar AS cenderung semakin langka di pasar. Apalagi kebutuhan sektor ekonomi lain terhadap dolar AS juga tinggi, seperti pembayaran pinjaman luar negeri pokok yang jatuh tempo dan bunganya setiap tahun, serta defisit transaksi berjalan (*current account*) maka turut memperlemah rupiah karena dibutuhkan mata uang dolar AS untuk pembayarannya.

Sebagai gambaran tahun 2012, neraca perdagangan luar negeri mengalami defisit sebesar USD1.670,2 juta. Defisit perdagangan luar negeri ini sebagian besar disumbang oleh defisit neraca ekspor-impor minyak dan gas bumi (migas) yang sejak tahun 2008 mengalami

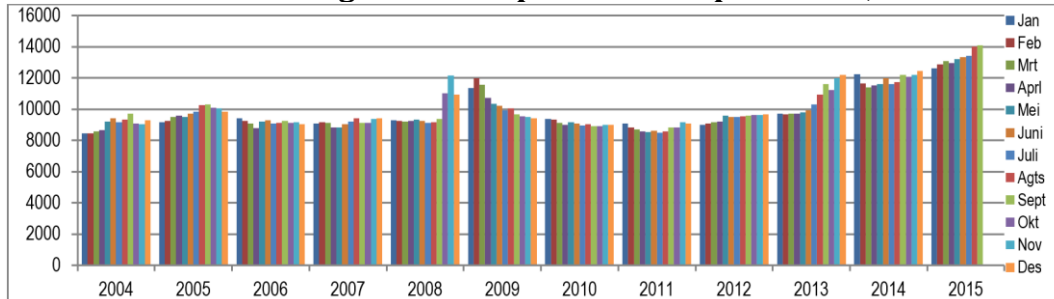
defisit. Defisit ekspor-impor Migas tahun 2012 lalu mencapai USD5.587,0 juta. Neraca perdagangan tahun 2013 dan 2014 masing-masing defisit sebesar USD4.070,0 juta dan USD1.886,3 juta. Defisit neraca perdagangan luar negeri tersebut juga disebabkan defisit ekspor-impor Migas, kecuali Non-Migas. Apabila tahun 2015 dan 2016, neraca perdagangan luar negeri masih defisit maka hal ini dapat mengakibatkan nilai rupiah semakin merosot karena kebutuhan dolar AS semakin besar. Defisit neraca perdagangan luar negeri ini jelas memicu terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar AS sebagai akibat dari kebutuhan akan dolar AS untuk membayar impor barang semakin besar.

Sejak 2004 sampai 2009, kurs rupiah sudah diperdagangkan di atas Rp9.000 per dolar AS. Walaupun secara rata-rata masih berkisar antara Rp9.300 – Rp9.800 per dolar AS, tetapi rupiah sempat menyentuh level Rp11.120 pada Triwulan IV tahun 2008. Pada Triwulan I/2009 terjadi kembali depresiasi rupiah menjadi Rp11.700 per dolar AS atau mengalami penurunan nilai 5,21% dibanding triwulan IV/2008. Sejak September 2009 sampai Desember 2012 kurs rupiah relatif stabil pada kisaran rata-rata Rp9.100 – Rp9.600 per dolar AS. Bulan Januari 2013 terjadi depresiasi rupiah di mana kurs rupiah tercatat Rp9.700 per dolar AS. Sejak Januari 2013, nilai rupiah terdepresiasi sampai Januari 2014. Pada bulan Desember 2013 kurs rupiah diperdagangkan sebesar Rp12.190 per dolar AS. Nilai ini merosot tajam dibandingkan kurs rata-rata Februari 2013 sebesar Rp9.667 per dolar AS atau nilainya turun sebesar 26,09% selama 10 bulan. Sedangkan pada Januari 2014, rupiah diperdagangkan di level Rp12.210 per dolar AS, atau melemah 0,33% dibandingkan dengan akhir Desember 2013, lebih kecil dari pelemahan pada Desember 2013 sebesar 1,71%. Secara rata-rata, nilai rupiah Januari 2014 diperdagangkan Rp12.075 per dolar AS, melemah 0,7%. Selama bulan Desember 2014 nilai rupiah kembali melemah (depresiasi) rata-rata diperdagangkan sebesar Rp12.440 per dolar AS atau merosot sebesar 3,02%.

Memasuki Januari 2015, nilai rupiah kembali merosot dengan kurs rata-rata Rp12.625 per dolar AS. Bahkan pada Maret 2015, rupiah terdepresiasi jauh diperdagangkan pada kisaran Rp13.000 s/d Rp13.085 per dolar AS. Merosotnya nilai rupiah tersebut merupakan tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan. Bahkan pada akhir Agustus 2015, rupiah sempat diperdagangkan pada level Rp14.050 per dolar AS. Artinya, dalam selama tiga tahun terakhir (Agustus 2012 s/d Agustus 2015), nilai rupiah menurun tajam sebesar 46,44% dari Rp9.650 menjadi Rp14.050 per dolar AS. Hal ini merupakan depresiasi nilai rupiah yang luar biasa.

Apabila pemerintah tidak segera melakukan pengurangan depresiasi rupiah, maka diprediksi rupiah akan menembus ke level Rp15.000 per dolar AS pada Desember 2015.

Gambar 1. Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap Dolar AS, 2004 - 2015.



Sumber: Kemendag, BI, data diolah.

B. Rumusan Masalah

Dalam pengelolaan perekonomian saat ini, khususnya menjaga stabilitas rupiah pemerintah perlu belajar dari dua krisis yakni: *pertama*, krisis ekonomi-moneter tahun 1998 dimana bulan Januari 1998 rupiah merosot tajam ke level Rp16.650 per dolar AS dari sebelumnya Rp5.000 (196%). *Kedua*, krisis ekonomi tahun 2008—walau tidak separah krisis ekonomi-moneter tahun 1998, rupiah juga mengalami depresiasi yang cukup besar (34,86%). Pada November 2008, rupiah sempat diperdagangkan Rp12.150 per dolar AS. Namun, nilai rupiah kembali menguat (terapresiasi) dengan rata-rata nilai kurs Rp10.950 per dolar AS.¹² Dalam sistem devisa bebas yang diterapkan pemerintah, nilai atau kurs rupiah terhadap mata uang asing didasarkan dan ditentukan oleh mekanisme pasar (pasar uang).

Depresiasi rupiah mengakibatkan mahalannya harga barang impor, karena pembeli harus menambah rupiah Rp1.000 – Rp2.000 untuk setiap 1USD untuk membayar impor. Dampaknya akan terjadi inflasi yang disebabkan depresiasi rupiah terhadap dolar AS karena terjadi penambahan nominal rupiah untuk membayar impor barang dari luar yang cenderung meningkat setiap tahun (*import/cost push inflation*). Dampaknya, pembeli akan menaikkan harga barang impor yang dipasarkan di dalam negeri.

Depresiasi rupiah juga mempengaruhi pembayaran pinjaman pokok LN dan bunganya setiap tahun, kecuali sudah disepakati nilai kurs tetap (*fixed rate*). Sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan ketetapan kurs valuta asing dalam pembayaran cicilan utang luar negeri dan bunganya dan diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku, maka fenomena depresiasi rupiah akan berdampak negatif terhadap peningkatan pembayaran utang luar negeri pokok

¹²Rupiah tembus Rp12.599 per dolar, terendah sejak 26 November 2008, dalam <http://fokus.news.viva.co.id>. diakses 31 Agustus 2015.

dan bunga utang. Sebagaimana diketahui pinjaman (*outstanding foreign debt*) luar negeri pemerintah juga berdenominasi dalam dolar AS. Semakin terdepresiasi rupiah, semakin bertambah jumlah nominal pembayaran cicilan utang LN pokok dan bunganya yang jatuh tempo.

Di samping depresiasi rupiah memiliki implikasi negatif terhadap perekonomian, khususnya defisit neraca ekspor-impor dan pinjaman luar negeri, tetapi di sisi lain memberikan dampak positif dari investasi asing langsung (*foreign direct investment*) dan ekspor non-migas. Semakin meningkat nilai investasi asing langsung ke Indonesia, maka cenderung semakin menambah arus masuk mata uang dolar AS (*capital inflow*) ke dalam negeri, baik untuk disimpan di lembaga perbankan dalam negeri maupun untuk dibelanjakan/dipergunakan membangun industri. Demikian juga dengan meningkatnya ekspor non-migas. Depresiasi rupiah akan menguntungkan eksportir dengan semakin murah harga barang ekspor non-migas di pasar internasional. Depresiasi rupiah juga akan meningkatkan daya saing komoditas ekspor non-migas Indonesia dengan komoditas sama di pasar dunia.

Dari tabel di atas dapat dilihat pelemahan atau depresiasi rupiah terhadap dolar AS terjadi sejak pertengahan tahun 2013 sampai September 2015. Sejak 2004 sampai 2012, nilai rupiah relatif stabil dan rata-rata diperdagangkan di bawah Rp10.000 per dolar AS. Depresiasi yang terjadi sejak akhir 2008 sampai awal 2009 merupakan gejolak sesaat dan cenderung stabil kembali sampai Juni 2013. Sejak Juli 2013 sampai September 2015 rupiah terdepresiasi dan diperdagangkan di atas Rp11.000 per dolar AS. Sepanjang tahun 2014, kurs rupiah rata-rata mencapai Rp12.000 per dolar AS dan sejak Januari 2015, rupiah terus merosot di atas Rp13.000 per dolar AS. Depresiasi rupiah sejak Juli 2013 sampai Agustus 2015 mencapai 40-45%. Kemerossotan rupiah terhadap dolar AS, tanpa dimbangi dengan upaya lain seperti masuknya investasi asing, peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan cadangan devisa BI (*reserve*), maka akan berdampak buruk pada perekonomian dan pelaku usaha, terutama sektor industri (manufaktur) yang masih bergantung pada impor.

Momen depresiasi rupiah seharusnya juga dapat menguntungkan ekonomi, dari sisi ekspor dan pariwisata. Dengan depresiasi rupiah harga barang ekspor lebih kompetitif di pasar internasional dibandingkan barang yang relatif sama/sejenis dari negara lain, kecuali tidak terjadi depresiasi mata uang negara importer terhadap rupiah dan dolar AS.

Bulan April-September 2013, neraca ekspor-impor minus. Dan sejak Juli 2013, rupiah sudah mendekati Rp11.000 per dolar AS di mana level tertinggi depresiasi rupiah yang cukup besar pada Nopember-Desember 2013 menjadi Rp12.000 per dolar AS (gambar 2). Merupakan suatu ironi, bahwa di saat rupiah mengalami depresiasi, neraca ekspor-impor minus atau defisit, karena perekonomian masih sangat bergantung pada impor yang membutuhkan dolar AS untuk transaksi pembayarannya. Defisit neraca ekspor-impor justru memperburuk dan memperlemah rupiah karena semakin besar permintaan dolar AS di pasar uang dalam negeri untuk membiayai impor, tetapi tidak diimbangi laju pertumbuhan eskpornya. Defisit neraca ekspor-impor sebagian besar memang disumbang oleh impor minyak mentah dan hasil olahan minyak mentah termasuk bahan bakar minyak (*oil products*) yang setiap tahun meningkat sejak tahun 2005.

Pada 2014 lalu, neraca ekspor-impor juga mengalami defisit sebesar USD1.890 juta. Pada 2011, neraca perdagangan luar negeri masih positif dengan peningkatan ekspor non-migas cukup besar. Tetapi, dalam periode 2012-2014, neraca perdagangan luar negeri mengalami defisit cukup besar. Artinya, importir membutuhkan banyak dolar AS untuk membayar barang-barang impor. Semakin besar defisit neraca perdagangan luar negeri maka semakin besar kebutuhan terhadap mata uang dolar AS. Defisit neraca ekspor-impor tidak hanya memperlemah rupiah tetapi juga dapat mengurangi cadangan devisa negara di Bank Indonesia. Hal ini disebabkan neraca perdagangan luar negeri turut mempengaruhi kondisi neraca pembayaran (*balance of payment*) yang selalu dimonitor oleh bank sentral.

C. Tujuan Analisis

Tulisan utama penulisan ini menganalisa hubungan implikasi depresiasi Rupiah terhadap dolar Amerika (USD) perdagangan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan cadangan devisa negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Nilai Tukar

Dalam teori ekonomi, terdapat beberapa sistem nilai tukar suatu mata uang. Menurut Mudrajad Kuncoro, Ph.D., ada beberapa sistem nilai tukar mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu:¹³

¹³SistemNilaiTukar, (*online*) dalam<http://e-journal.uajy.ac.id/>, dikasestgl.8 September 2015.

Pertama, Sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*). Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu : a) Mengambang bebas (murni) di mana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar uang, tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini sering disebut *clean floating exchange rate*. Di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs. b) Mengambang terkendali (*managed or dirty floating exchange rate*) di mana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs mata uang pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa suatu negara biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valuta asing untuk mempengaruhi pergerakan kurs.

Kedua, Sistem kurs tertambat (*pegged exchange rate*). Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama. Menambatkan atau menetapkan nilai kurs ke suatu mata uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi, sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya.

Ketiga, Sistem kurs tertambat merangkak (*crawling pegs*). Dalam sistem nilai tukar ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan (*shocks*) terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi mata uang yang tiba-tiba dan tajam.

Keempat, Sistem sekeranjang mata uang (*basket of currencies*). Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam “keranjang” umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda

tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi, sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda bobot dan nilainya.

Kelima, Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate*). Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya terhadap mata uang negara lain dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valuta asing dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi, tetapi dalam batas yang sangat sempit.

Sedangkan yang dimaksud dengan kurs merupakan harga atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Kurs merupakan instrumen penting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruhnya yang cukup besar bagi neraca transaksi berjalan (*current account*) dan neraca pembayaran, maupun variabel-variabel makro yang lainnya. Oleh karena itulah, kurs juga mata uang merupakan sebuah harga aktiva atau harga asset (*asset price*), sehingga prinsip-prinsip pengaturan harga asset-asset lainnya juga berlaku dalam pengaturan kurs. Nilai tukar suatu mata uang terbagi atas nilai tukar riil (*real exchange rate*) dan nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*). Nilai tukar riil adalah nilai tukar yang digunakan untuk menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain. Sedangkan nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan untuk menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.¹⁴

Nilai tukar suatu mata uang juga dapat dianalisa dengan pergerakan inflasi dan perubahan tingkat suku bunga di suatu negara dalam teori *International Fischer Effect (IFE)*. Teori *International Fischer Effect* menjelaskan bahwa; *the appreciation or depreciation of currency prices is proportionally related to differences in nominal rates of interest. The International Fisher Effect theory suggests that currency of any country with a relatively higher interest rate will depreciate because high nominal interest rates reflect expected inflation (Madura, 2010).*¹⁵

Teori di atas menjelaskan hubungan nilai tukar dan inflasi yaitu teori *International Fischer Effect (IFE)*. Sedangkan jika teori *Purchasing Power Parity* menekankan bahwa nilai tukar suatu mata uang akan berubah seiring dengan daya beli mata uang suatu negara yang dipengaruhi oleh inflasi, maka teori IFE menekankan pada hubungan suku bunga dan nilai tukar. Menurut teori ini, nilai tukar mata uang suatu negara akan dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga di kedua negara tersebut. Nilai tukar mata uang suatu negara dengan suku bunga

¹⁴ Analisis pengaruh nilai tukar, SBI, inflasi dan pertumbuhan (GDP) terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia (BEI), oleh Hismendi; Abu bakar Hamzah dan Said Musnadi, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.1. Nomor 2, Mei 2013, Penerbit Program Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Aceh, hlm.20.

¹⁵ *A Test of the International Fisher Effect in Selected Asian Countries*, by Maurice K. Shalishali-Columbus State University United States of America (USA), dalam, *the International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 4, Special Issue – February 2012*/<http://www.ijhssnet.com/journals/>, hlm.86-87., diakses 15 September 2015.

lebih tinggi, akan melemah terhadap mata uang negara lain dengan suku bunga lebih rendah. Hal ini terjadi karena negara dengan suku bunga yang tinggi cenderung memiliki laju inflasi yang juga tinggi. Dan sebaliknya, nilai tukar suatu mata uang dengan tingkat suku bunga relatif tinggi, akan cenderung menguat dengan mata uang negara lain dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih rendah.¹⁶

B. Sistem Nilai Tukar Rupiah dari Masa ke Masa

Sebelum tahun 1970, Indonesia menganut rezim devisa kontrol, sedangkan kebijakan rezim devisa bebas diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1970 tanggal 17 April 1970, transaksi devisa dilakukan di bursa valuta asing dan melalui bank devisa. Kemudian pada Agustus 1971, terjadi perubahan penetapan nilai tukar rupiah yaitu nilai tukar tidak lagi ditetapkan berdasarkan transaksi di bursa valuta asing, melainkan ditetapkan pemerintah (Bank Indonesia) dengan mengaitkan nilai tukar rupiah pada dollar AS. Tujuan perubahan kebijakan tersebut untuk mendorong ekspor dan meningkatkan investasi dalam negeri dan investasi asing.¹⁷

Periode tahun 1970-1978, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate system*) dengan melakukan 3 (tiga) kali devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar AS. Devaluasi rupiah dilakukan karena nilai rupiah yang ditetapkan tidak lagi sesuai dengan nilai riilnya. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 1964, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ditetapkan dengan kurs resmi Rp250 per satu dollar AS.¹⁸

Kemudian pada 15 November 1978, pemerintah melakukan kebijakan devaluasi rupiah terhadap dolar AS sebesar 33,6% yaitu dari Rp415 menjadi Rp625. Pada 30 Maret 1983 pemerintah kembali melakukan devaluasi rupiah dari Rp702 menjadi Rp970 per USD. Selain melakukan devaluasi nilai rupiah, pemerintah juga menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange system*), dengan mengaitkan nilai tukar rupiah terhadap sekerajang mata uang mitra dagang utama. Dalam sistem ini—sejak 1978 s/d Juli 1997, ditetapkan nilai tukar rupiah indikasi dan membiarkan nilai tukar rupiah bergerak dalam kisaran tertentu. Pemerintah melakukan intervensi, apabila nilai tukar rupiah bergerak melebihi batas atas atau batas bawah. Tujuan diterapkannya sistem nilai tukar terkendali adalah untuk mencegah nilai rupiah mengalami *over-valued* atau *under-valued*, dibandingkan

A. ¹⁶Pilih Rupiah atau Dollar, (*online*), dalam <http://www.kompasiana.com/>, diakses 15 September 2015.

¹⁷Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, (*online*), <http://www.bphn.go.id/data/documents/>, diakses 9 September 2015

¹⁸*Ibid.*

dengan nilai tukar yang sebenarnya (*real exchange rate*) yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan pasar.¹⁹

Sejak 1992 sampai Agustus 1997, fleksibilitas nilai tukar rupiah semakin dikembangkan dengan penerapan *crawling band*. Fleksibilitas rupiah dengan *crawling band*, ternyata ampuh bertahan selama beberapa dekade, karena dapat mempertahankan stabilitas nilai rupiah dan memberikan ruang gerak berupa fleksibilitas guna merespon keadaan pasar dengan adanya band intervensi yang merupakan kewenangan BI sebagai otoritas moneter. Setiap tahun rata-rata nilai rupiah mengalami depresiasi sekitar 4-5% terhadap dolar AS.²⁰

Memasuki tahun 1998, pemerintah memilih dan menetapkan sistem nilai tukar rupiah yang *flexible* sejak pertengahan tahun 1997. Implikasinya kemungkinan melebarnya rentang fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat besar. Sejak krisis 1998 sampai pertengahan 1999, depresiasi rupiah terhadap dolar AS masih lebih besar dibanding negara tetangga yang juga menganut sistem nilai tukar yang *flexible*, seperti Thailand dan Filipina. Keberhasilan memperkecil rentang fluktuasi nilai tukar rupiah kiranya dapat pula menjadi ukuran pemulihan ekonomi suatu negara, sebagaimana tercermin pada perkembangan nilai tukar Bath-Thailand dan Won-Korea Selatan.²¹

Sejak tahun 1999 hingga saat ini, pemerintah menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange system*). Sistem ini membiarkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing bergerak sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Walaupun terjadi depresiasi rupiah terhadap mata uang dagang utama seperti dolar AS, maka otoritas moneter melakukan intervensi yang relatif terbatas sesuai dengan kebijakan moneter yang ditempuh pada saat itu.

C. Pendekatan Moneter

Pendekatan moneter (*monetary approach*) dalam analisis pergerakan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Pendekatan moneter biasanya dilakukan oleh otoritas moneter bank sentral di suatu negara. Pendekatan ini menjelaskan bahwa, kurs devisa sebagai harga relatif dari dua jenis mata uang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran (*supply* dan *demand*) uang. Pendekatan moneter pada dasarnya terdiri dari dua versi, yaitu *pertama*, versi harga fleksibel (*fleksible price version*) dan *kedua*, versi harga kaku (*sticky price version*). Versi harga

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹Pilihan Sistem Nilai Tukar dan Pengendalian Arus Modal oleh Bobby Hamzar Rafinus, Makalah diakses online, <http://www.bappenas.go.id/files>, tgl. 9 September 2015, hl.6.

fleksibel muncul akibat adanya kritik terhadap anggapan adanya fleksibilitas harga dari suatu mata uang di pasar uang. Menurut versi ini, anggapan adanya kekakuan harga lebih realistis bila menyangkut jangka waktu yang pendek. Sedangkan versi harga kaku—sering disebut pendekatan Keynesian adalah karena anggapan bahwa adanya variabel jumlah uang beredar yang endogen. Kedua anggapan tersebut tidak mengakui efektifitas mekanisme pasar dalam menyelesaikan ketidakseimbangan pasar uang yang terjadi dalam jangka pendek.²²

Pendekatan moneter lain adalah melalui pengelolaan tingkat suku bunga BI. Perubahan suku bunga *BI Rate* juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena investor akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal asing yang masuk ke dalam negeri pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.²³

III. METODOLOGI ANALISIS

Tulisan ini membahas implikasi depresiasi rupiah terhadap USD dan hubungannya terhadap perdagangan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan cadangan devisa negara dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Tulisan ini didukung dengan data-data dan referensi yang relevan dengan topik yang dibahas.

²²Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, oleh Muhammad, Universitas Muhammadiyah Malang, (*online*) dalam www.directory.umm.ac.id, diakses 8 September 2015.

B. ²³Transmisi Kebijakan Moneter, (*online*) dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/>, diakses 14 September 2015.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Depresiasi Terhadap Ekspor-Import

Suku bunga (*interest rate*) dan nilai mata uang suatu negara memiliki hubungan yang searah, di mana kenaikan suku bunga suatu negara akan menyebabkan nilai mata uang negara tersebut menguat terhadap mata uang negara lain. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan suku bunga biasanya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga pinjaman, termasuk pinjaman luar negeri dan tabungan bank umum atau bank konvensional di negara bersangkutan. Sebagai ilustrasi misalnya, saat ini suku bunga ringgit Malaysia sebesar 3,25% dan peso Filipina sebesar 4%. Bank Sentral Malaysia menaikkan suku bunga sebesar 0,25% sehingga suku bunga ringgit Malaysia menjadi sebesar 3,5%. Asumsikan suku bunga peso Filipina adalah tetap.

Kenaikan suku bunga ringgit Malaysia tersebut akan menyebabkan investor mengalihkan modalnya ke Malaysia karena ingin memanfaatkan kenaikan suku bunga tersebut, sehingga permintaan terhadap ringgit Malaysia meningkat. Dengan demikian, mata uang ringgit Malaysia akan menguat (terapresiasi) terhadap mata uang peso Filipina. Jika suku bunga negara lain tetap atau tidak berubah, maka nilai tukar ringgit Malaysia pun akan menguat pula terhadap mata uang negara lain. Analog dengan hubungan antara dolar AS dan rupiah.

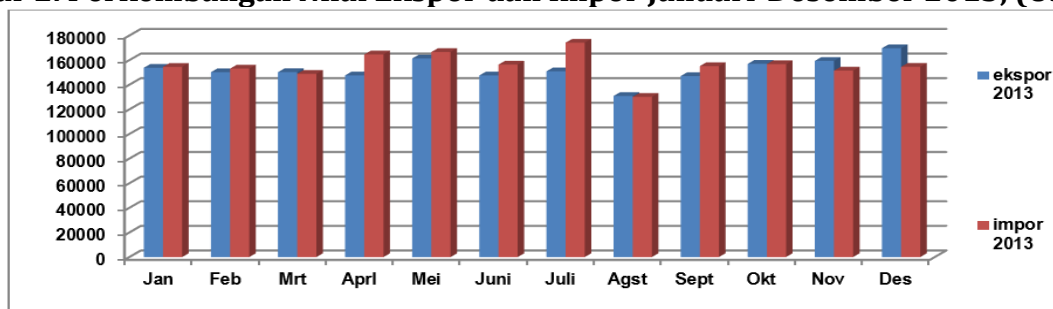
Jika pemerintah Indonesia tidak segera mengantisipasi naiknya suku bunga perbankan di AS, maka rupiah akan melemah karena pemilik dolar AS akan beralih menyimpan uang dolarnya pada bank baik di Indonesia maupun di AS yang menyebabkan jumlah dolar AS yang beredar di pasar (*domestic*) semakin sedikit. Implikasi depresiasi rupiah terhadap perekonomian, dijelaskan di bawah ini.

Secara garis besar terdapat tiga variabel yang mempengaruhi stabilitas ekonomi makro Indonesia dalam kaitan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yaitu *Pertama*, berhubungan dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran (*supply-demand*) atas mata uang rupiah dan dolar AS di dalam negeri. Merosotnya (depresiasi) nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat terhadap rupiah karena menurunnya peran atau aktivitas perekonomian nasional. Di samping itu, meningkatnya nilai mata uang dolar AS di pasar internasional sebagai alat pembayaran internasional karena kebutuhan dolar AS bertambah. Sehingga biaya impor mengalami kenaikan karena kebutuhan akan dolar AS sebagai alat pembayaran semakin meningkat. *Kedua*, adalah tingkat suku bunga sebagaimana dijelaskan di atas.

Ketiga adalah terjadinya inflasi. Tekanan depresiasi terhadap rupiah harus diimbangi dengan instrumen kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk mestabilkan nilai tukar rupiah, seperti menaikkan suku bunga simpanan/tabungan perbankan. Depresiasi rupiah menyebabkan kebutuhan terhadap mata uang rupiah bertambah untuk mendapatkan dolar AS karena mahal dan langkanya mata uang dolar AS. Karena dolar AS dibutuhkan untuk membayar impor. Peningkatan kebutuhan akan dolar AS bisa menyebabkan inflasi yang didorong oleh impor barang karena harga barang impor akan meningkat di pasar domestik²⁴

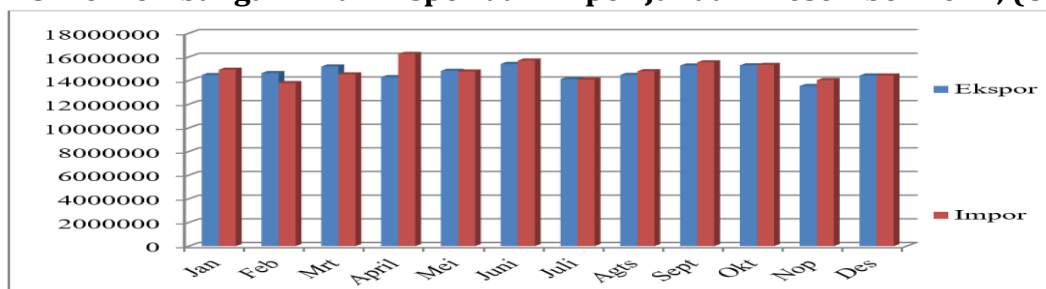
Pada saat Indonesia sudah menjadi *net-importer* minyak, khususnya impor bahan bakar minyak (BBM), maka depresiasi rupiah akan meningkatkan harga jual bahan bakar minyak di pasar domestik. Di samping itu, impor non-migas termasuk impor barang konsumsi yang cenderung meningkat setiap tahun akan meningkatkan inflasi. Hal ini lah salah satu yang mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan luar negeri sejak tahun 2012.

Gambar 2. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Januari-Desember 2013, (USDJuta)



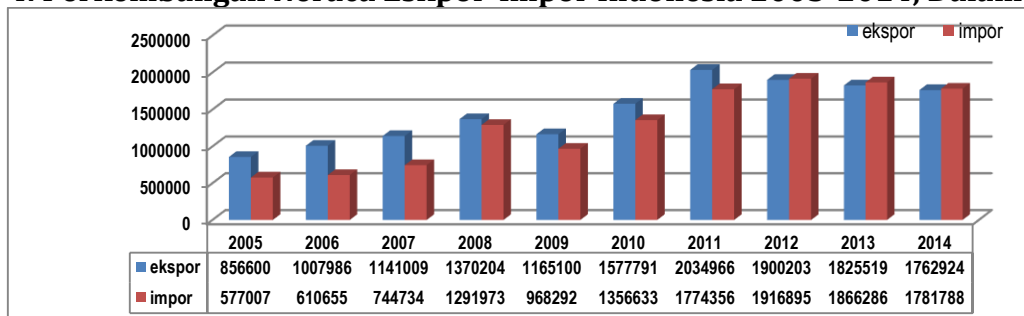
Sumber: Indikator Ekonomi, Juni 2014, Penerbit BPS Jakarta.

Gambar 3. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Januari-Desember 2014, (USD Juta)



Sumber: Ekspor-Impor, (online), <http://www.bps.go.id>, diakses 9 September 2015

D. ²⁴Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Masalah atau Rezeki Nomplok, (online), dalam <http://www.kompasiana.com>, diakses 8 September 2015.

Gambar 4. Perkembangan Neraca Eskpor-Import Indonesia 2005-2014, Dalam USD Juta.

Sumber: Indikator Ekonomi, Juni 2014, BPS, Jakarta (<http://www.bps.go.id>, diakses 7 September 2015)

Dari gambar 3 di atas, terjadi defisit neraca ekspor-import selama 7 bulan yakni dari Januari 2014 sampai November 2014. Sedangkan pada 2013, defisit neraca ekspor-import berlangsung selama 10 bulan, kecuali November dan Desember 2013 yang mengalami surplus. Walaupun terjadi surplus neraca perdagangan luar negeri, tetapi apabila laju kenaikan ekspor tidak terlalu signifikan, maka dapat menyebabkan inflasi di dalam negeri karena pertumbuhan impor masih cukup tinggi. Belum lagi defisit yang terjadi sepanjang tahun 2012.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan, meski ada depresiasi kurs rupiah tetapi belum mampu memperbaiki neraca perdagangan luar negeri, mengingat 60% ekspor nasional berupa barang non-migas atau barang komoditas yang harganya sedang jatuh. Artinya, tidak banyak yang dapat dijadikan sebagai langkah untuk meredam depresiasi rupiah karena di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum pulih.

Sedangkan dari sisi industri manufaktur yang berorientasi ekspor, mayoritas bahan bakunya berasal dari impor juga sehingga depresiasi rupiah tidak banyak menguntungkan bagi Indonesia dan tidak dapat membantu neraca perdagangan luar negeri. Oleh karenanya jika memang pemerintah ingin memanfaatkan momen depresiasi rupiah lebih menguntungkan, maka pendekatan yang harus dibuat pemerintah adalah bagaimana mendorong agar industri hilir dan industri menengah bisa berkembang agar impor bahan baku dan impor barang modal bisa ditekan setiap tahun.²⁵ Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam struktur industri nasional karena bahan baku dan barang modal untuk proses produksi masih bergantung pada impor dari luar.

E. ²⁵Mengancam deficit perdagangan: Tekanan depresiasi rupiah berkelanjutan, Selasa, 24/02/2015, (online), <http://www.neraca.co.id/article>, diakses 11 September 2015.

B. Dampak Defisit Ekspor-Impor Terhadap PDB

Dengan terjadinya defisit neraca ekspor-impor yang relatif besar, maka berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), di mana pertumbuhan ekonomi (PDB) juga dipengaruhi besaran ekspor minus impor ($PDB = \text{konsumsi masyarakat } C + \text{investasi } (I) + \text{pengeluaran pemerintah } (G) + (\text{ekspor-impor})$). Artinya depresiasi rupiah seharusnya dapat mendorong ekspor lebih besar lagi, tetapi karena sebagian besar ekspor merupakan komoditas hasil sumber daya alam (SDA), pertanian, dan perkebunan. Karena struktur ekspor Indonesia juga masih mengandalkan ekspor komoditas yang rata-rata belum diolah. Hal ini menggambarkan industri hilir belum berkembang, termasuk dengan berkembangnya isu hilirisasi industri mineral sebagaimana yang amanatkan dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Harga komoditas ekspor terutama komoditas perkebunan saat ini cenderung turun. Sehingga tidak dapat menutupi laju naiknya impor. Di sisi lain impor pangan yang cenderung meningkat turut mempengaruhi laju pertumbuhan.

Pada saat defisit neraca perdagangan barang terus terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB). Oleh karena itu dalam lima tahun terakhir (2011-2015), pertumbuhan ekonomi nasional sebagian besar disumbang oleh sektor konsumsi dan investasi domestik. Pada 2015 lalu memang terjadi surplus neraca perdagangan barang sebesar USD7.670,7 miliar. Tetapi terjadi defisit neraca ekspor-impor minyak sebesar USD8.038,9 miliar.²⁶ Defisit neraca ekspor-impor minyak turut menyumbang depresiasi rupiah karena kebutuhan dolar AS tinggi di sektor ini, termasuk impor minyak mentah untuk kebutuhan kilang minyak di dalam negeri.

Penurunan ekspor dan peningkatan impor akan menurunkan cadangan devisa. Sebaliknya surplus neraca ekspor-impor akan meningkatkan jumlah cadangan devisa. Di samping itu, besarnya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan bunga juga turut mengurangi jumlah cadangan devisa.

Sebaliknya peningkatan jumlah wisatawan manca negara ke Indonesia dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*) akan menambah jumlah cadangan devisa. Bank Indonesia pernah mengintervensi nilai tukar rupiah untuk mengurangi volatilitas nilai rupiah di pasar spot dengan menggunakan sebagian cadangan devisa. Sejak 2009 sampai 2014, jumlah wisatawan luar negeri berkunjung ke Indonesia terus bertambah. Penerimaan devisa dari wisatawan luar negeri tersebut juga meningkat setiap tahun sejak 2009. Pada 2009 devisa yang

²⁶Neraca Perdagangan Indonesia, <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>, diakses 24 Agustus 2016.

masuk dari wisatawan luar negeri berjumlah USD6.297,99 juta dan pada 2014 sudah mencapai USD11.166,13 juta.²⁷

C. Solusi Kebijakan

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (*foreign currency*) merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Tugas dan kewenangan BI dalam menstabilkan nilai tukar rupiah didasarkan kepada UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2004 di atas ditegaskan,

tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa: untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2009 disebutkan bahwa, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b.mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan yang dimaksud sistem nilai tukar berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sistem nilai tukar berdasarkan ketentuan di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk diajukan kepada pemerintah.

Tujuan BI dalam mengupayakan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing antara lain adalah menjaga kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan (*over-valued*), bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.²⁸

²⁷Infrastruktur Pariwisata Dibenahi, *Harian Bisnis Indonesia*, Selasa, 15 September 2015.

F. ²⁸Tujuan Kebijakan Moneter, dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/>, diakses 14 September 2015.

Secara teoritis dan praktis, meningkatnya ekspor dan arus investasi asing langsung akan menambah *supply hard currency*, khususnya Dolar AS di pasar domestik. Namun kenyataannya devisa yang diperoleh terbatas hanya berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dan sebagian kecil ekspor diantaranya ekspor non-migas. Kondisi ini cukup mengesankan mengingat potensi devisa yang benar-benar dapat masuk ke Indonesia untuk memupuk cadangan devisa sangat besar. Namun ironisnya, peningkatan cadangan devisa Indonesia lebih banyak berasal dari aliran modal asing jangka pendek (*hot money*) yang memiliki potensi pembalikan devisa keluar secara tiba-tiba (*sudden reversal*).²⁹

Dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, BI telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, tertanggal 30 September 2011. Inti dari peraturan BI di atas antara lain adalah bahwa dalam rangka memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia dari gejolak ekonomi global, maka Indonesia sangat berkepentingan terhadap peran eksportir dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional. Bank Indonesia memandang, sudah saatnya ekonomi kita lebih didukung melalui devisa hasil ekspor dan devisa dari pinjaman luar negeri. Pasokan modal yang bersumber dari devisa hasil ekspor (DHE) akan lebih menjamin kesinambungan kecukupan cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia (*reserve money*) yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan menjaga ketahanan ekonomi domestik dari guncangan ekonomi global dan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya bagi pengembangan ekonomi nasional. Oleh karenanya Bank Indonesia berkepentingan untuk mengatur lalu lintas devisa yang berasal dari ekspor dan utang luar negeri. Aturan Bank Indonesia yang diterapkan sejak Januari 2012, mewajibkan transaksi atas devisa yang diterima dari hasil ekspor dan utang luar negeri harus melalui bank devisa di dalam negeri.³⁰ Meskipun harus melalui bank devisa di dalam negeri tidak terdapat kewajiban eksportir untuk menyimpan devisa tersebut di bank tersebut atau dengan perkataan lain, setelah ditransaksikan melalui bank di dalam negeri eksportir diperkenankan memindahkan devisanya ke bank dimana saja pada saat itu juga.

Di samping itu, tidak ada kewajiban eksportir harus mengkonversikan devisanya ke dalam mata uang rupiah. Aturan main ini sesuai dengan prinsip lalu lintas devisa bebas yang dianut, dimana Bank Indonesia hanya ingin memahami nilai sebenar-benarnya dari ekspor dan utang luar negeri yang selama ini terjadi. Dengan demikian, kekuatan devisa Indonesia

²⁹Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah Melalui Arus Masuk Devisa, (*online*), dalam http://www.bi.go.id/id/publikasi_diakses 7 September 2015.

³⁰Saat ini terdapat sebanyak 35 bank devisa nasional.

nantinya secara psikologis dapat menjadi benteng pertahanan terhadap munculnya guncangan nilai tukar rupiah. Kebijakan baru pengaturan lalu lintas devisa hasil ekspor dan utang luar negeri di Indonesia, sebenarnya lazim diterapkan oleh sebagian besar negara, khususnya *emerging countries*.

Beberapa negara ASEAN yang sudah menerapkan kebijakan hasil ekspor wajib masuk ke bank domestik diantaranya adalah Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan di India kewajiban masuk ke bank domestik diikuti dengan kewajiban konversi ke mata uang negaranya. Aturan pemakaian bank domestik bagi lalu lintas devisa ekspor di beberapa negara, juga memiliki makna nasionalisme untuk memanfaatkan hasil penjualan dari ekspor atas produksi domestik bagi keuntungan negeri sendiri dan dapat dipergunakan untuk investasi domestik.

Kebijakan moneter Bank Indonesia lainnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar domestik adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683). Untuk melaksanakan ketentuan dalam PBI di atas, BI mengeluarkan surat edaran. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tertanggal 1 Juni 2015 ditegaskan, adanya kewajiban penggunaan mata uang rupiah di Wilayah Indonesia yang menganut asas teritorial. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik dilakukan penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai, dan transaksi non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Kekecualian dari ketentuan di atas yang mengharuskan menggunakan valuta asing yakni kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah yang meliputi antara lain: a) kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; b) pasar uang antar-bank (PUAB) dalam valuta asing; c) obligasi dalam valuta asing; d) *sub-debt* dalam valuta asing; e) jual beli surat berharga dalam valuta asing; f) transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya.

Di samping itu, kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi setiap transaksi seperti: a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); b) penerimaan atau pemberian hibah dari/atau ke luar negeri yang dilakukan

oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri; c) transaksi perdagangan internasional; d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, seperti tabungan valuta asing atau deposito valuta asing; e) transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia.

Untuk mengurangi tekanan depresiasi rupiah, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan moneter antara lain: 1) Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah; 2) Melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan tetap memperhatikan dampaknya pada ketersediaan SBN bagi *inflow* dan likuiditas pasar uang; 3) Menyesuaikan frekuensi lelang *Foreign Exchange Swap* dari 2 kali seminggu menjadi 1 x seminggu dan mengubah mekanisme lelang Term Deposit (TD) Valas dari *variable rate* tender menjadi *fixed rate* tender, menyesuaikan *pricing*, dan memperpanjang tenor sampai dengan tiga bulan; 4) Menurunkan batas pembelian valuta asing dengan pembuktian dokumen *underlying* dari yang berlaku saat ini sebesar USD100 ribu menjadi USD25 ribu per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP; 5) Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan bank sentral negara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia; 6) Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), guna mengalihkan likuiditas harian ke tenor yang lebih panjang.³¹

Dalam konteks perekonomian global yang sangat terbuka dan saling ketergantungan antar-negara saat ini, Indonesia tidak mungkin kembali kepada sistem perekonomian tertutup. Seperti yang dijelaskan dalam kebijakan moneter Bank Indonesia dalam stabilisasi nilai tukar rupiah, bank sentral tidak bertujuan untuk mematok nilai rupiah terhadap dolar AS atau mata uang asing lainnya pada nilai tertentu (*fixed value*). Bank Indonesia menjaga pergerakan atau volatilitas mata uang rupiah di pasar yang terkendali dengan tetap menjaga tingkat fluktuasi sekecil mungkin. Upaya menjaga volatilitas rupiah yang tidak terlalu besar dan relatif kecil merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah dengan sistem devisa bebas. Hal ini menjadi dilemma, pada saat sistem devisa bebas terus berkembang, tetapi di sisi lain bank sentral relatif sulit mengontrol pergerakan rupiah yang bisa setiap saat terdepresiasi.

Dalam konteks rupiah yang terdepresiasi saat ini, Bank Indonesia masih belum menaikkan tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI-Rate*). Bahkan Bank Indonesia dapat menurunkan tingkat suku bunga untuk menggerakkan sektor riil sebagai dampak lesunya

G. ³¹Tiga Kebijakan BI Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, (*online*), <http://jateng.tribunnews.com/>, diakses 10 September 2015.

perekonomian global. Tetapi instrumen stabilisasi rupiah sudah dilakukan seperti mewajibkan eksportir untuk melaporkan nilai ekspornya (devisa hasil ekspor), serta mewajibkan untuk menyimpannya pada bank devisa nasional di dalam negeri. Solusi kebijakan ini sesuai ketentuan dalam UU tentang Lalu Lintas Devisa dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, yang juga mengharuskan setiap transaksi ekonomi dan keuangan di dalam negeri mewajibkan menggunakan rupiah sebagai alat tukar atau alat pembayaran, baik *cash* maupun secara *online* (*e-transaction* atau *e-commerce*).

Solusi lain untuk mengurangi depresiasi atau volatilitas rupiah tidak terlalu besar dan tidak terlalu fluktuatif adalah dengan mendorong ekspor, terutama ekspor non-migas, serta mengurangi impor bahan baku dan barang modal dengan mengembangkan industri hilir dan industri menengah (*industri substitusi impor*). Kejatuhan nilai rupiah terhadap dolar AS tidak selamanya merupakan efek berantai dari kejatuhan nilai tukar mata uang di Asia. Upaya mendorong masuknya investasi asing langsung juga merupakan strategi yang penting untuk mencapai penguatan rupiah karena semakin banyaknya uang dolar AS yang masuk ke dalam negeri untuk membiayai investasi di berbagai sektor.

Publik dan pelaku ekonomi masih menunggu apakah Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga BI (*BI-Rate*) sebagai alternatif kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah di pasar. Dengan naiknya suku bunga Bank Indonesia, maka rupiah akan semakin sedikit di pasar sehingga rupiah secara perlahan akan menguat karena jumlah rupiah yang beredar cenderung berkurang dengan masuknya rupiah ke perbankan. Tetapi dengan asumsi Bank Sentral AS (*the Fed Reserve*) belum menaikkan suku bunganya (*Fund Rate*).

V. PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan sistem nilai tukar mata uang yang dianut oleh Indonesia—sistem nilai tukar mengambang bebas, ketika sebelum terjadi krisis ekonomi-moneter (1997/1998) memberikan gambaran relatif stabilnya pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan kecenderungan rupiah mengalami sedikit apresiasi (penguatan) rupiah terhadap dolar AS.

Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS mengalami puncaknya pada saat terjadi krisis ekonomi-moneter tahun 1997/1998 dengan menguatnya dolar AS terhadap

beberapa mata uang Asia, termasuk rupiah. Ketidakstabilan perekonomian domestik sebagai akibat dari goncangan ekonomi (*shock*) eksternal yang terjadi hampir di berbagai negara khususnya Asia menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami *over-estimate* atau *under-valued*. Akibatnya, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup tajam sehingga mempengaruhi kinerja fundamental perekonomian domestik yang lain.

Depresiasi rupiah tidak hanya membawa pengaruh positif tetapi juga berdampak negatif. Salah satu risiko depresiasi rupiah yang terjadi sampai saat ini—terutama pada periode 2011-2014 terjadinya defisit neraca ekspor-impor barang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan dan pada akhirnya mempengaruhi neraca pembayaran.

Pergerakan atau volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tersebut pada sisi lain, juga dapat meningkatkan penerimaan negara yakni meningkatnya daya saing ekspor sangat tinggi sehingga hasil devisa ekspor (DHE) yang diperoleh juga sangat besar. Namun, ekspor non-migas tidak dapat meningkat pesat karena sebagian besar harga komoditas ekspor non-migas seperti pertanian dan perkebunan cenderung turun karena lesunya kondisi perekonomian negara-negara importir barang dari Indonesia. Dalam perekonomian dunia yang tidak stabil dan lesu, tentunya sangat sulit untuk meningkatkan kinerja ekspor non-migas Indonesia untuk menambah cadangan devisa dari hasil ekspor (DHE) karena daya beli masyarakat luar negeri akan terganggu dan menurun sebagai dampak dari terganggunya kegiatan ekonomi di masing-masing negara dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara importir.

B. Rekomendasi

Bagi importir dalam negeri depresiasi rupiah terhadap dolar AS tersebut juga berdampak pada kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*), di mana komponen produksi utamanya harus diimpor dari luar negeri, seperti bahan baku dan barang modal untuk kebutuhan industri dalam negeri. Kenaikan biaya produksi karena pergerakan kurs rupiah ini, pada akhirnya akan dibebankan pada harga barang yang diproduksi. Dalam situasi perekonomian yang masih cenderung melambat, daya beli masyarakat dalam negeri juga tentunya mengalami penurunan. Hal ini berarti *output* yang dihasilkan produsen tersebut juga akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produksinya di pasar. Solusi lain yaitu meningkatkan investasi domestik dan asing untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi (PDB).

Pasca krisis ekonomi 1998, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan volatilitas yang semakin sering terjadi. Perekonomian Indonesia memiliki tingkat keterbukaan dan sensitivitas yang semakin besar, seiring dengan penggunaan mata uang asing (valuta asing) dalam transaksi ekonomi domestic yang dilakukan pelaku ekonomi nasional dan internasional. Di samping itu, pembentukan kawasan/blok perdagangan antar-negara seperti; AFTA, CAFTA, MEA, atau dalam skala yang lebih luas APEC dan WTO memberikan ruang perdagangan dunia yang lebih luas bagi semua negara. nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan terus mengalami volatilitasnya sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran (*supply-demand*) mata uang rupiah dan dolar AS di pasar uang. Walaupun otoritas moneter Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar uang dalam rangka menjaga stabilitas kurs rupiah pada level wajar agar tidak *under-valued*, tetapi relatif belum mengurangi depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

Jika pergerakan nilai tukar rupiah sudah *over-valued/under-valued* dan ekspektasi masyarakat sudah tidak rasional, maka intervensi bank sentral dalam bentuk pembelian mata uang asing khususnya dolar AS atau penjualan mata uang asing (US\$) menjadi sebuah instrumen yang kurang berarti. Dalam upaya meredam dampak gejolak nilai tukar rupiah tidak terdepresiasi jauh, maka kebijakan untuk mendorong kegiatan ekspor non-migas dan menarik investasi asing langsung menjadi langkah mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB) nasional. Kegagalan meredam gejolak nilai tukar rupiah yang sudah terdepresiasi jauh, dapat membawa perekonomian kembali pada kondisi krisis ekonomi-moneter tahun 1997/1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramantyo Djohanputro, (2006), *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, Pusat Pendidikan Manajemen (PPM) Institut, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik RI, *Statistik Indonesia 2012*, Penerbit BPS Jakarta.
 -----, *Statistik Indonesia 2013*, Penerbit BPS Jakarta.
 -----, *Statistik Indonesia 2014*, Penerbit BPS Jakarta.
 -----, *Indikator Ekonomi Juli 2014*, Penerbit BPS Jakarta.
- Bank Indonesia, *Statistik Keuangan Indonesia*, Berbagai Edisi, Penerbit Bank Indonesia, Jakarta.
- Didik J. Rachbini, (2001), *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2010*.
 -----, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2011*.
 -----, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2012*.
 -----, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2013*.
 -----, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014*.
 -----, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2015*.
 -----, *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2016*.
- Mudrajad Kuncoro, (2011), *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Edisi 5), Penerbit UPP STIM YKPN.
- Paul A. Samuelson, (1985), William Nordhaus, *Economics*, Terjemahan A.Q Khalid, PT.Erlangga, Jakarta.
- R.Gregory Mankiw, (2014), *Brief Principles of Macroeconomics*, 7th Edition, Published by South- Western College Publication, USA.
 -----, (2007), *Makroekonomi*, Edisi bahasa Indonesia, Cetakan Ke-enam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, (2011), *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Penerbit CV.Alfabeta, Bandung.
- Steven Pressman, (2000), *Fifty Major Economists*, Terjemahan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solikin, (2002), *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Jakarta.
- Analisis pengaruh nilai tukar, SBI, inflasi dan pertumbuhan (GDP) terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia (BEI), oleh Hismendi; Abubakar Hamzah dan Said Musnadi, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.1.Nomor 2, Mei 2013, Penerbit Program Pascasarjana Universitas Syah Kuala Aceh, hlm.20.

- A Test of the International Fisher Effect in Selected Asian Countries*, by Maurice K. Shalishali-Columbus State University United States of America (USA), dalam, **the International Journal of Humanities and Social Science**, Vol.2 No.4, Special Issue-February 2012/, hlm.86-87.
- Infrastruktur Pariwisata Dibenahi, *Harian Bisnis Indonesia*, Selasa, 15 September 2015.
- Sriyanto,SE.,MM.,Ekonomi Moneter,(2014), **Makalah**, Penerbit Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan lalu-lintas devisa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang LN korporasi non-bank.
- Surat Edaran BI, Nomor 17/11/DKSP tertanggal 1 Juni 2015.
- BI Intervensi Rupiah, Cadangan Devisa Melorot US\$3,9 Miliar,(*online*),<http://finansial.bisnis.com/read/>, diakses 11 September 2015.
- Ekspor Impor Indonesia, (*online*) dalam www.kemendag.go.id, diakses 15 September 2015.
- Mengancam defisit perdagangan: Tekanan depresiasi rupiah berkelanjutan, (*online*), <http://www.neraca.co.id/article>, diakses 11 September 2015.
- Neraca Perdagangan Indonesia Total, (*online*) dalam <http://www.kemendag.go.id>., diakses 31 Agustus 2015.
- Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah, (*online*), dalam <http://www.kemendag.go.id>., diakses 31 Agustus 2015.
- Statistik Utang LN Indonesia, Agustus 2015, (*online*),dalam <http://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Documents/>, diakses 14 September 2015
- Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah Melalui Arus Masuk Devisa, (*online*), dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi>., diakses 7 September 2015.
- Tiga Kebijakan BI Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, (*online*), <http://jateng.tribunnews.com/>, diakses 10 September 2015.
- Tujuan Kebijakan Moneter, (*online*), dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/>, diakses tgl.14 September 2015.
- Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI pada 15 Agustus 2014, pada Rapat Paripurna DPR RI Jakarta